

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT
MACET DITENGAH PANDEMI COVID-19
PADA PT. BPR BKK KOTA TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjanah Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MOHAMAD DONI YAHYA NOVIANTO

NPM 5117500166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI TENGAH
PANDEMI COVID-19 PADA PT. BPR BKK KOTA TEGAL

Oleh :

M. DONI YAHYA NOVIANTO

NPM. 5117500166

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 16 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202



Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.
NIDN. 0605037501

Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani., S.H., M.H.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI TENGAH
PANDEMI COVID-19 PADA PT. BPR BKK KOTA TEGAL

Oleh :

M. DONI YAHYA NOVIANTO

NPM. 5117500166

Tegal, 28 Juli 2021

Penguji I



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN. 0610116002

Penguji II



Dr. MOH. Khamim, S.H., M.H
NIDN. 0617026101

Pembimbing I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H
NIDN. 0605037501



Mengetahui
Dekan,

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H., M.H.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Doni Yahya Novianto
NPM : 5117500166
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM KREDIT MACET
DITENGAH PANDEMI COVID-19 PADA PT.
BPR BKK KOTA TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



Mohamad Doni Yahya Novianto)

ABSTRAK

Mohamad Doni Yahya Novianto. KAJIAN HUKUM KREDIT MACET DITENGAH PANDEMI COVID-19 PADA PT. BPR BKK KOTA TEGAL Skripsi. Program Strata 1, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga dapat disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Penelitian dengan judul “Kajian Hukum Penyelesaian Kredit Macet Ditengah Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR BKK Kota Tegal”, memiliki rumusan masalah Bagaimana upaya BKK BPR dalam menangani permasalahan kredit macet selama pandemi Covid-19 dan Apa kendala dalam penanganan Kredit Macet selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji upaya bank dalam menangani permasalahan mengenai kredit macet.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data akan dianalisa dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Dalam keadaan pandemi saat ini PT. BPR BKK Kota Tegal mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu : Rescheduling (penjadwalan kembali), Restructuring (penataan kembali), Reconditioning (penataan kembali), Subsidi bunga. Akan tetapi pada bank BPR sendiri paling sering menentaskan kredit macet yaitu dengan cara rescheduling. Kreditur akan menawarkan penjadwalan ulang terhadap debitur, dengan kata lain tenor kredit yang berlaku sebelumnya bisa diperpanjang menurut kebijakan kreditur. Dan jika ada debitur yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran kredit, Semua kebijakan tersebut diserahkan kepada bank dan sangat bergantung pada identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak dari pandemi covid-19.

Kata Kunci: Kredit macet, PT. BPR BKK Kota Tegal, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Mohamad Doni Yahya Novianto. REVIEW OF BAD CREDIT LAW IN THE MIDST OF THE COVID-19 PANDEMIC AT PT. BPR BKK TEGAL CITY Thesis. Undergraduate Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal, 2021.

The Bank as one of the business entities that provide money loans to the public in the form of credit grants requires the delivery of credit guarantees by credit applicants. Credit granting is one of the bank's business activities in order to manage the funds it controls to be productive and provide profit. If the credit received by the borrower is not repaid so that it can be concluded as bad credit, the credit guarantee received by the bank will be disbursed for the repayment of the bad credit. The research is titled "Study of Bad Credit Settlement Law In The Midst of the Covid-19 Pandemic at PT. BPR BKK Tegal City", has a problem formulation How bkk bpr efforts in handling bad credit problems during the Covid-19 pandemic and What are the obstacles in handling bad loans during the Covid-19 pandemic. This study aims to review the bank's efforts in dealing with problems regarding bad loans. And to review the impact that occurred during the Covid-19 pandemic for banks.

This research uses library research method, which is research that uses sukender data. The data source can be obtained through document browsing. The data source used is in accordance with the main focus of research that is normative, then the data to be collected are secondary data from positive law, which includes legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then the data will be analyzed in this study is qualitative analysis, which is research that refers to the legal norms contained in the laws and regulations as well as norms that live and develop in society. Based on the data analysis conducted, it was concluded that in the current pandemic state PT. BPR BKK Tegal issued various policies, namely: Rescheduling, Restructuring, Reconditioning, Interest subsidy. However, bpr banks themselves most often eradicate bad loans by rescheduling. The creditor will offer a rescheduling of the debtor, in other words the tenor of the previously applicable credit can be extended according to the creditor's policy. And if there are debtors who have difficulty in making credit payments, can report that they have difficulty in credit payments.

Keywords: *Bad credit, PT. BPR BKK Tegal City, Covid-19 Pandemic.*

MOTTO

**SAYA MEMULAI, SAYA MEMPELAJARI, SAYA MENERJAKAN, SAYA
BIMBINGAN, SAYA REVISIAN, SAYA UJIAN, DAN AKHIRNYA SAYA
MENANG.
KEMUDIAN JALAN HIDUP BARU SAJA DIMULAI**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan dan mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan penulis.
2. Kepada bapak ibu dan kaka yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah berhenti untuk kesuksesan penulis, ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian sebagai orang tua saya, karena tanpa kalian penulis bukan apa-apa.
3. Serta keluarga besar penulis selalu membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada M. LUTHFANZA RISKY, AQIL BUDI SANTOSO, CHANDRA SETIAJI, DIYAH KRISDIANTI, AZALIA VERDITA yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan dan selalu bersedia menemani penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Terakhir untuk TEMAN, TETANGGA, DAN SEMUANYA yang selalu bertanya “kapan lulus” itu membuat saya termotifasi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Tony Haryadi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Tiyas Vika Widyastuti, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Dr. Mukhidin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I, Dr, Evy Indriasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada
8. Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I. Mudah-mudahan mendapatkan balsan dari Allah SWT., sebagai amal shalih.

10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
12. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 30 Juli 2021

Mohamad Doni Yahya Novianto

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	13
B. Tinjauan Tentang Kredit	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet atau Kredit Bermasalah	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Sejarah PT. BPR BKK Kota Tegal	40
2. Struktur Organisasi PT. BPR BKK Kota Tegal	42
B. Pembahasan	43
1. Upaya PT. BPR BKK Kota Tegal dalam menangani permasalahan kredit macet selama pandemi Covid-19	43

2. Kendala yang dialami PT. BKK Kota Tegal dalam penanganan kredit macet selama Pandemi Covid-19	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
BIODATA PENULIS	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan upaya pembangunan nasional di bidang perekonomian, jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi dalam suatu Negara, dimana bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan pada suatu Negara.¹ Dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia kearah yang lebih baik, maka usaha yang dapat dilakukan untuk mencapainya adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kehidupan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara meminta pinjaman dengan pihak lain atau memberi pinjaman berupa uang kepada pihak lain.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012, hlm.20.

dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.² Sistem keuangan Indonesia di jalankan oleh beberapa sektor salah satunya yaitu bank sentral, perbankan, yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang berbunyi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka menghidupkan taraf hidup masyarakat banyak. **Dalam pengoperasiannya sendiri Bank wajib memelihara kesehatan perbankan yang**sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank wajib memelihara kesehatannya dan dinilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Bank Umum. Hal ini karena kesehatan bank merupakan bentuk contoh cerminan kondisi bank dan kinerja bank yang baik. Selain itu, Kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak baik pemilik, pengelola, pengguna jasa bank dan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank.³

Sementara itu, bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pemberian

² M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

³Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen danNilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*(Samarinda:RV Pustaka Horizon), hlm.15-17

pinjaman uang. Anggota masyarakat yang memerlukan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Dalam kegiatan operasional bank konvensional pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit (agunan).⁴ Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji.

Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga dapat disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Dari praktik perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi kredit macet pihak peminjam. Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit. Hasil penjualan jaminan kredit akan digunakan untuk melunasi utang pihak peminjam kepada bank sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan kerugian bank dan juga untuk memenuhi

⁴ M. Bahsan, Op.Cit., hlm. 3.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan menetapkan ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan secara sempurna dan merupakan bagian dari hukum jaminan. Disamping itu, dalam menerima jaminan kredit harus pula dipatuhi ketentuan perundang-undangan lain yang termasuk dalam lingkup hukum jaminan yang mengatur, antara lain tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, sifat, dan bentuk jaminan utang.⁵ Namun pada akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan fenomena wabah penyakit virus covid-19 atau yang biasa orang sebut virus corona.China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia.Pada 31 Desember 2019.

Pada penghujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) di china mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis *pneumonia* yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.⁶ Setelah di Indonesia terdapat orang yang terinfeksi virus corona ini, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa untuk seluruh

⁵*Ibid.*, hlm. 4.

⁶<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> dikutip pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.45

masyarakat Indonesia harus mengurangi kegiatan di luar rumah seperti bekerja atau kegiatan di bidang pendidikan, selama 14 hari untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Untuk di industri perbankan sendiri, pengaruh dari dampak wabah corona ini yaitu banyak nasabah yang menarik dana simpanannya untuk membeli bahan makanan selama *lockdown* ini. Perbankan yang mempunyai liquiditas tinggi tidak akan masalah dengan penarikan dana yang banyak karena mereka mempunyai stok dana simpanan yang banyak.

Namun kebijakan Presiden Joko Widodo tentang penangguhan penundaan cicilan selama setahun, baik industri perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini bisa mengganggu kesehatan bank atau bisa seperti kejadian kredit macet. Dana yang seharusnya masuk ke bank, tapi malah tertunda selama masa lockdown ini.⁷ Permasalahan ini terus berlanjut sampai hari ini dan bank juga terus mengalami penurunan dalam kesehatan bank yang semakin menjauh dari standar kesehatan bank yang sudah ditentukan dalam Undang-undang di Indonesia, kredit macet itu sendiri memiliki arti suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan ini lah penyebab bank

⁷<https://www.kompasiana.com/muhrizalalamin/5ebbb15ed541df498400f703/pengaruh-covid-19-terhadap-tingkat-kesehatan-bank-di-indonesia> dikutip pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.45

mengalami penurunan dalam kesehatannya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengambil skripsi dengan judul:

“Kajian Hukum Penyelesaian Kredit Macet Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada BPR BKK Tegal Timur Kota Tegal”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya BKK BPR dalam menangani permasalahan kredit macet selama pandemi Covid-19 ?
2. Apa kendala dalam penanganan Kredit Macet selama Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji upaya bank dalam menangani permasalahan mengenai kredit macet.
2. Untuk mengkaji dampak yang terjadi selama pandemi Covid-19 bagi perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat bagi :

1. Pihak Bank :

Untuk pihak bank dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran evaluasi serta analisis terhadap tingkat kesehatan bank dimasa pandemi Covid-19 ini.

2. Umum

Untuk memberikan wawasan mengenai teori tingkat kesehatan bank dimasa pandemi Covid-19 serta dijadikan acuan sebagai alat analisis untuk mengetahui kinerja bank.

3. Akademik

Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan penulis dalam melaksanakan penelitiannya penulis mengkaji beberapa skripsi terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal ini tema kajian, meskipun berbeda variabel dalam hal subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa skripsi terdahulu:

1. Bungaran Kevin Sinambela, USU 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet yang Objek Jaminannya Hak Atas Tanah Berstatus Hak Milik (Studi Kasus Di PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan)”.⁸ Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian kredit macet yang di alami bank PT BPR yang ada di Indonesia. Adapun persamaan antar skripsi penulisan dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas perihal masalah kredit macet yang ada di

⁸ Bungaran Kevin Sinambela”Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian kredit macet yang objek jaminannya ha katas tanah berstatus hak milik(studi kasus di PT BPR Asia Bintang Cemerlang Medan), Skripsi Sarjana Hukum, Medan:Perpustakaan Fakultas Hukum USU, 2018. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 23.10

Indonesia, dan perbedaannya sendiri pada waktu dan objek penelitiannya.

2. Mardhiyatur Rosita Ningsih, UIN Walisongo, 2020 “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah”.⁹Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian kredit macet yang dialami bank selama pandemic Covid-19 yang ada di Indonesia. Adapun persamaan antar skripsi penulisan dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas perihal masalah permasalahan bank selama pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia, dan perbedaannya sendiri pada waktu dan objek penelitiannya.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya dalam suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Pengertian Metode penelitian suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara untuk melakukan suatu prosedur. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

⁹ Mardhiyatur rositi ningsih,”dampak pandemic covid-19 terhadap manajemen industri perbankan syariah, skripsi sarjanah hukum, Semarang:Perpustakaan UIN Walisongo, 2020. Diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 21.15WIB.

lingkungan yang dihadapinya.¹⁰Berikut ini beberapa metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan memiliki jenis penelitian ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif-empiris atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Selain menggunakan pendekatan normatif, ¹¹ penulis juga menggunakan penelitian langsung di lapangan, dalam arti penulis ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit macet pada PT. BPR BKK di tengah pandemi covid-19, dengan pertimbangan utama bahwa pendekatan normatif masih belum cukup untuk dapat mengetahui realitas yang terjadi dalam masyarakat, mengenai kesehatan bank yang ada di Indonesia khususnya PT. BPR BKK di tengah pandemi covid-19.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 5-6

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2004, hlm. 53

c. Sumber Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber Data Dalam Penelitian Normatif diperoleh dari:¹²

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, POJK Nomor 2/POJK.03/2021 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³

- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm. 52

¹³ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal.

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁴

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti.

e. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Penyelesaian Kredit Macet di Tengah Pandemi Covid-19 Pada BKK BPR” akan dimuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan memuat norma-norma hukum dan landasan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13

membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian yang lainnya. Di dalamnya juga terdapat hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan memuat tentang semua permasalahan yang di alami Bank PD BPR BKK selama pandemi Covid-19 dan cara menanganinya.

Bab IV Penutup. Bab ini akan memuat tentang simpulan yang merupakan inti jawaban dan permasalahan serta asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, serta saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II buku III KUH Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁵

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 338.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.
- d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.¹⁶

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu:

- a. Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷
- b. KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁸
- c. Handri Raharjo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan

¹⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224-225.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 224-225.

¹⁸ Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 14.

dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.¹⁹

- d. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Pengertian tersebut menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Perjanjian

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 42.

²⁰ Naja, H.R. Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 84.

tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Adanya perjanjian, akan timbul suatu hubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum yang demikian ini disebut dengan perikatan. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan, atau dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan unsur perjanjian sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian ini disebut sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau wenang dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Subyek hukum dapat dalam kedudukan pasif atau sebagai debitur atau dalam kedudukan yang aktif atau sebagai kreditur.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak, persetujuan di sini bersifat tetap, dalam arti bukan baru dalam tahap berunding. Perundingan itu sendiri adalah merupakan tindakantindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan.

- c. Adanya tujuan yang akan dicapai, tujuan mengadakan perjanjian terutama guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, bila telah ada persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya
- e. Adanya bentuk tertentu, dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu maka perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti.
- f. Adanya syarat tertentu, mengenai syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari perjanjian, karena dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak.

Jika semua unsur yang ada tadi dihubungkan dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) maka dapat disimpulkan:

- a. Syarat adanya persetujuan kehendak diantara pihak-pihak dapat meliputi unsurunsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk tertentu.
- b. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur-unsur dari pihak-pihak yang ada dalam perjanjian.
- c. Adanya hal tertentu sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun jasa, serta obyek dapat berwujud dan tak berwujud.
- d. Adanya kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu sendiri meliputi unsur tujuan yang akan dicapai.

Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun

kreditur maupun debitor tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya perjanjian:

- a. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.
- c. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a. Perbuatan. Kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi

yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.²¹ Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²² Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini memiliki ruang lingkup kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan objek perjanjian;

²¹ Salim, H.S., dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 124.

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Op Cit.*, hlm. 342.

5) Menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan.²³

b. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihakpihak mengenai pokokperjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.²⁴

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda). Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.²⁵

d. Asas Itikad Baik (Togoe dentrow). Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²⁶ Itikad baik ada 2, yaitu:

1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan;

2) Bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang.²⁷

4. Syarat Sahnya perjanjian

Pada Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, hal tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu:

²³ Handri Raharjo, *Op Cit.*, hlm. 43-44.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 45

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op Cit.*, hlm. 342

²⁷ Handri Raharjo, *Op Cit.*, hlm. 45.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Pernyataan sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.²⁸

5. Berakhirnya perjanjian

Dalam suatu perjanjian ada dua cara agar perjanjian itu dapat berakhir meskipun perjanjian itu sudah disepakati, dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, yakni jika salah satu pihak tidak terpenuhi maka pihak yang lain dapat minta pembatalan (canceling). Dalam Pasal 1454 KUH Perdata disebutkan jangka waktu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun, sedangkan dua syarat yang lain dinamakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (null and void).²⁹

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2018, hlm. 67.

²⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Gramedia Widiarsana Indonesia, 2008, hlm. 32.

Dalam suatu perjanjian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhapusnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Pembayaran, yaitu penyerahan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan.
- 2) Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Penawaran pembayaran terjadi jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur menitipkan uang atau barang kepada notaris, setelah itu notaris menjumpai kreditur untuk melaksanakan pembayaran.
- 3) Pembaruan utang, adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian diganti dengan perjanjian lain.
- 4) Penjumpaan utang atau kompensasi, terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang masing-masing.
- 5) Pencampuran utang, terjadi akibat bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang.
- 6) Pembebasan utang, terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak lagi menghendaki adanya pemenuhan prestasi oleh debitur.
- 7) Musnahnya barang yang terutang, musnahnya barang yang diperjanjikan (objek) maka perjanjian juga dapat hapus.
- 8) Kebatalan atau pembatalan, tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir.

- 9) Berlakunya suatu syarat batal, yaitu syarat yang jika terpenuhi menghentikan perjanjian membawa segala sesuatu seperti semula (tidak pernah ada suatu perjanjian)
- 10) Lewatnya waktu (daluarsa) adalah suatu upaya untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang.³⁰

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Handri Raharjo, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu:

a. Perjanjian menurut sumbernya :

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya: Perkawinan;
- 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda;
- 3) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban;
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.³¹

b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:

- 1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduanya;

³⁰ *Ibid.hlm. 33.*

³¹ Handri Raharjo, Op Cit., hlm. 59.

2) Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya hak saja.³²

c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi :

- 1) Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak, misalnya : perjanjian hibah;
- 2) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu terdapat hubungan hukum, misalnya: Perjanjian jual beli, sewamenyewa.³³

d. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi :

- 1) Perjanjian bernama (nominaat), adalah perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya: perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dan lain-lain;
- 2) Perjanjian tidak bernama (innominaat), yaitu perjanjian yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan, misalnya: Perjanjian waralaba, dan lain-lain.³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 60.

³³ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

e. Perjanjian menurut bentuknya, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Perjanjian Lisan, terbagi 2 (dua) yaitu:

- a) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;
- b) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya : perjanjian penitipan barang.

2) Perjanjian Tertulis, terbagi 2 (dua) yaitu :

- a) Perjanjian standard atau baku, adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen;
- b) Perjanjian formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya : perjanjian hibah harus dibuat dengan akta notaries.³⁵

f. Perjanjian yang bersifat istimewa, dibedakan menjadi :

- 1) Perjanjian liberatoire, adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya: pembebasan hutang (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

³⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

- 2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 3) Perjanjian untung-untungan, misalnya : Perjanjian asuransi.
- 4) Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian/seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu bertindak sebagai penguasa.³⁶

g. Perjanjian penanggungan (borgtocht) Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.³⁷

h. Perjanjian menurut sifatnya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Perjanjian pokok, perjanjian yang utama, misalnya: Perjanjian Kredit Bank
- 2) Perjanjian aksesoir, perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama, misalnya: pembebanan hak tanggungan atau fidusia, gadai.³⁸

B. Tinjauan tentang kredit

1. Pengertian kredit

Istilah kredit bukan merupakan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, karena sering dijumpai pada anggota masyarakat yang melakukan jual beli barang secara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Masyarakat pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

mereka harus membayar lunas. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Maka dasar dari pemberian kredit sebenarnya kepercayaan atau keyakinan kreditur bahwa debitur pada masa yang akan datang mempunyai kesanggupan untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.³⁹

Pengertian yang lebih luas, kredit dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, maka intisari pengertian kredit menurut penulis adalah adanya unsur kepercayaan serta pertimbangan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur, adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi terdapat suatu masa yang memisahkannya

³⁹ Fauzi, Ahmad, Eksistensi *Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 3: Inovatif, 2010, hlm. 89.

dan kondisi semacam ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Sebelumnya dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Untung menyebutkan unsur-unsur kredit sebagai berikut, yaitu:

- a. Kepercayaan, diartikan bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi (uang dan jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, diartikan sebagai waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree of risk, merupakan resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, maka semakin tinggi pula risikonya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek kredit, ini tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.⁴⁰

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya ada 2 (dua), yaitu pihak kreditur (bank) sebagai pemberi fasilitas kredit dan pihak debitur sebagaipenerima atau peminjam kredit, akan tetapi hal tersebut akan menjadi lain apabila barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau personal guaranteediberikan oleh pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dalam hal ini sebagai penjamin. Hal tersebut akan berdampak luas apabila pihak debitur wanprestasi.⁴¹

2. Jenis-jenis Kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

- a) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut.
- b) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu

⁴⁰ Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 3.

siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

- c) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.⁴²

3. Unsur-unsur Kredit

Dasar-dasar Perkreditan, menurut Thomas Suyanto, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, atau jasa, akan benar benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilaiagio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Degree Of Risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh

⁴² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.57.

kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- 4) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karna kehidupan ekonomi moderen sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sewaktu-waktu kita jumpai dalam praktik perkreditan.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk melaksanakan analisa kredit, metode 5C digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit, kelima prinsip tersebut adalah :

- 1) Karakter (watak), yaitu analisa yang dilakukan terhadap pribadi nasabah perseorangan atau pengurus dari suatu badan usaha,
- 2) Capacity (kemampuan), yaitu analisa terhadap kemampuan nasabah dalam merealisasikan rencana usaha dan perkembangannya serta menilai realistis tidaknya dalam menetapkan rencana yang meliputi aspek teknis, produksi, pemasaran, dan sebagainya,
- 3) Capital (modal), yaitu menilai kemampuan nasabah dalam merealisasikan usahanya, karena kredit pada dasarnya hanya merupakan dana pelengkap, hal ini dimaksudkan agar nasabah ikut bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi,

- 4) Collateral (jaminan), yaitu analisa yang dilakukan dengan menilai jaminan yang diberikan. Jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko kemungkinan kerugian yang terjadi akibat kegagalan pengembalian kredit,
- 5) Condition of Economic (kondisi ekonomi), yaitu penilaian kredit atas dasar kondisi ekonomi sektor usaha calon debitur serta beberapa sektor usaha yang berkaitan.

5. Penggolongan Kredit

Penggolongan kredit memiliki kriteria tunggakan untuk BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 4, menyatakan :

a. Lancar apabila:

1. tidak terdapat tunggakan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
2. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 bulan dan kredit belum jatuh tempo.

b. Kurang Lancar, apabila:

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 3 bulan dan/atau
2. kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan.

c. Diragukan, apabila:

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 6 bulan dan/atau
2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan

d. Macet, apabila:

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 bulan
2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan
3. kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan /atau
4. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, antara lain: ⁴³

1. Nasabah Menyalahgunakan Kredit Yang Diperoleh Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakainnya sehingga nasabah harus mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya, Pemakaian kredit yang menyimpang. misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian akan mengakibatkan usaha nasabah gagal.
2. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usaha Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang kurang menguasai bidang usaha, karena nasabah mampu menyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

⁴³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.115.

3. Nasabah Beritikad Tidak Baik Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit walaupun dengan resiko apapun, biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggungjawab. Timbulnya kredit-kredit bermasalah (macet) selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Bank dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. hal tersebut karena dalam melakukan analisis, pihak bank melakukan analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.⁴⁴

6. Jaminan Kredit

Di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya maka dalam praktek salah satu usaha yang biasanya dilakukan oleh pihak bank adalah selalu saja meminta kepada para nasabahnya untuk memberikan jaminan sebelum dilakukannya proses pencairan kredit. Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 116.

pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan (accessoir) dalam arti perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Jaminan ini pada hakekatnya berfungsi memberikan keyakinan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang debitur serta memberikan dorongan kepada debitur untuk melunasi utangnya sebab apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan akan dilikleng untuk menutupi pelunasan utang-utang debitur tersebut.

Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Jaminan yang bersumber dari undang-undang Pasal 1131 KUHPerdara : "segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Pasal 1132 KUHPerdara : "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan".
2. Jaminan yang berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat berupa hipotik, Hak Tanggungan Atas Tanah Gadai, Fidusia, dan penanggungan pribadi (jaminan pribadi). Secara umum masalah jaminan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1. Jaminan Perorangan

2. Jaminan Kebendaan.

1. Jaminan Perorangan Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban kewajibannya finansialnya terhadap kreditur (bank).
2. Jaminan Kebendaan Jaminan kebendaan (zakeiijk) merupakan jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut ke manapun benda tersebut beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet atau Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin do Yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan,

⁴⁵ Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan. Mandar Maju*, Bandung, hlm.72

sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Menurut Suhardjono, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang Telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

- a. Kurang Lancar (KL),
- b. Diragukan (D) dan
- c. Macet (M).⁴⁶

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga Terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan bank itu sendiri.⁴⁷

2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Timbulnya kredit macet dalam dunia perbankan dewasa ini tidak hanya semata-mata disebabkan oleh nasabah selaku debitur tetapi juga dapat disebabkan

⁴⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 9-10

⁴⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 146

oleh kreditur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah, yang dilihat secara umum yaitu:

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya,
- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya,
- c. Nasabah beritikad tidak baik sejak semula.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, penyebab dari suatu keadaan kredit yang macet adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami debitur. Penyebab dari kesulitan-kesulitan keuangan tersebut. Dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Faktor Intern Yaitu faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri. Dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain:
 - a) kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan
 - b) tidak efektifnya pengawasan atas biaya - biaya/ongkos perusahaan
 - c) kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif.
 - d) terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap.
 - e) permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor-Faktor Ekstern Penyebab kredit bermasalah yang dapat di kategorikan sebagai factor ekstern antara lain:
 - a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
 - b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami

musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan.⁴⁸

3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Macet

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet. Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji (wanprestasi). Di mana harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan Pernyataan Cidera Janji. Ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.⁴⁹

⁴⁸ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 109

⁴⁹ Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm.22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. SEJARAH PT. BPR BKK KOTA TEGAL

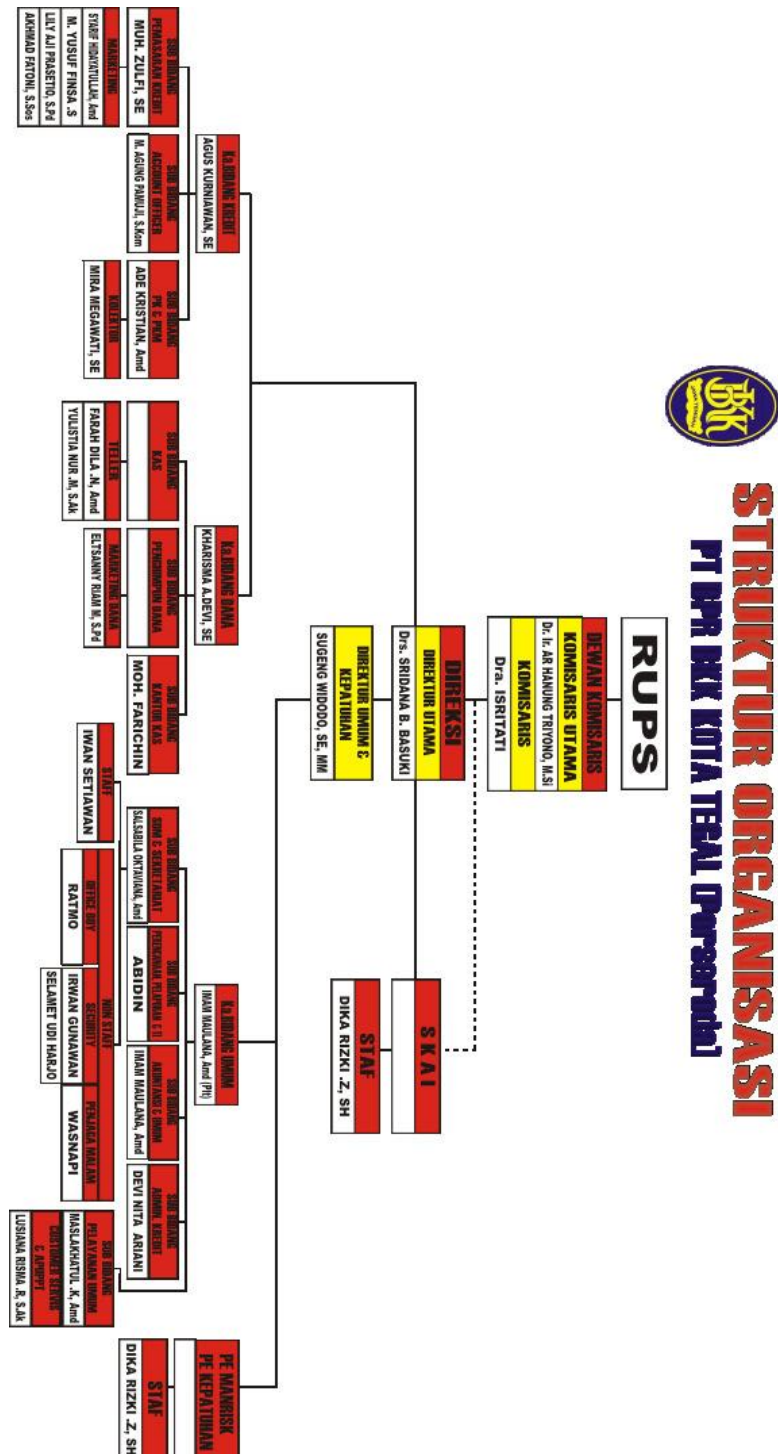
PT BPR BKK Kota Tegal (Perseroda) yang beralamat di Jl. Dr. Ciptomungun kusumo No.63. Kota Tegal. Dengan kantor kas di Jl. Sumbodro No. 14 Kota Tegal ini dahulu pada tahun 1969 bernama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sumurpanggang (PD BKK Sumurpanggang) adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 September 1969, nomor Dsa.G $\frac{226/1969}{8/2/4}$ tanggal 19 November 1970, nomor Dsa.G $\frac{323/1970}{12/19/74}$ yang selanjutnya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Badan Kredit Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan KepMenKeu RI No. 1064/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 jo KepMenKeu RI No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan, PD BKK SUMURPANGGANG berubah status menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Margadana (PD BPR BKK Margadana) Kota Tegal berdasarkan Izin Usaha KepMenKeu RI No. Kep-438/KM.13/1991 tanggal 8 Oktober 1991.

Seiring semakin pesatnya persaingan di dunia perbankan, PD BPR BKK MARGADANA Kota Tegal resmi berubah nama menjadi PD BPR BKK KOTA

TEGAL berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah dan keputusan kepala kantor perwakilan Bank Indonesia No.15/1/Kep.KPwBI/Tgl/2013, tanggal 21 Februari 2013 tentang perubahan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Margadana menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kota Tegal. Dan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU0067382.AH.01.01. Tahun 2019 tentang pengesahan pendiri badan hukum perseroan terbatas PT. BPR BKK Kota Tegal dan keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP21/KO.0303/2020 tanggal 23 Mei 2020 tentang pengalihan izin usaha atas perubahan badan hukum PD. BPR BKK Kota Tegal menjadi PT. BKK Kota Tegal (Perseroda) maka mulai tanggal 29 Mei 2020 PD. BKK Kota Tegal resmi menjadi PT. BKK Kota Tegal(Perseroda).⁵⁰

⁵⁰ home - PT. BPR BKK Kota Tegal (ptbprbkkkotategal.com, diakses pada 13 Mei 2021 pukul 19.59 WIB)

Struktur



organisasi PT. BPR BKK Kota Tegal

Sumber : PT. BPR BKK Kota Tegal

B. Pembahasan

1. Upaya PT. BPR BKK Kota Tegal dalam menangani permasalahan kredit macet selama pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Kurniawan, SE sebagai kepala bagian kredit di PT. BPR BKK Kota Tegal pada tanggal, 11 Juni 2021 menyatakan, untuk meningkatkan kualitas kredit di masa pandemi covid-19 ini, bank memberikan berbagai jalan keluar kepada debitur dengan melakukan perubahan syarat-syarat addendum kredit sesuai dengan POJK yang berlaku dimana bank dan debitur telah sepakat untuk menyetujui mengadakan perubahan dan atau tambahan dalam perjanjian kredit. Addendum merupakan istilah hukum yang lazim digunakan dalam perihal pembuatan perjanjian. Dalam pembuatan addendum ini dilakukan karena adanya perubahan dari isi perjanjian pokok, atau karena ada beberapa perjanjian kredit yang belum diatur dalam perjanjian pokoknya. Namun dalam perjanjian kredit pembuatan addendum umumnya dibuat dikarenakan dari pihak debitur mulai merasa tidak sanggup untuk membayar angsurannya, baik maupun bunganya. Secara umum pembuatan addendum dalam suatu perjanjian selalu terpisah dengan perjanjian pokok, namun secara hukum

suatu addendum akrab dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjanjian utama.⁵¹

Jika digolongkan untuk saat ini, maka penyebab dari kredit macet itu sendiri disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi virus corona. Dalam perkembangan penyebaran Covid-19 secara global di seluruh dunia yang telah berdampak secara langsung atau pun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan pinjaman di suatu bank sehingga dapat berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur. Yang akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi bank tersebut, maka untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil suatu kebijakan yang dapat meringankan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit ataupun pinjam di suatu bank, Dengan hal ini maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pada peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan dan perlindungan hukum kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan dukungan pelaksanaan dari Bank Indonesia, OJK dan lembaga Penjamin

⁵¹ Wawancara dengan Agus Kurniawan, Bagian kepala bagian kredit, di PT. BPR BKK Kota Tegal, tanggal 11 Mei 2021 jam 13.05-14.30

Pinjaman untuk melakukan kebijakan guna menjaga agar perekonomian tetap berjalan dengan baik. Menindak lanjuti kewenangan yang diberikan dalam peraturan tersebut, pihak OJK mengeluarkan sebuah Peraturan yaitu POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang telah diganti atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. di keluarkannya kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan resiko kredit perbankan. POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan penyebab dari adanya kredit macet dapat berasal dari factor internal yang berasal dari penyimpangan dari pelaksanaan kredit, atau kurangnya informasi tentang kredit macet dan juga faktor eksternal contoh penyebabnya adalah kegagalan usaha dari debitur, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi apa lagi di masa pandemi covid-19 ini. Lalu cara pemerintah untuk menyelamatkan agar tidak terjadi kredit macet yaitu :

A. Rescheduling (penjadwalan kembali)

1. Pengertian rescheduling

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok (*grace period*).

Dalam kebijakan rescheduling kreditur akan menawarkan penjadwalan ulang terhadap debitur, dengan kata lain tenor kredit yang berlaku sebelumnya bisa diperpanjang menurut kebijakan kreditur yang bersangkutan. Dengan begitu anda akan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan kewajiban dan jaminan aset tidak akan disita.

2. Cara mendapatkan rescheduling

Dalam melakukan rescheduling sebagai debitur harus bersikap terbuka dengan cara memberikan penjelasan yang detail dan secara logis mengenai alasan mengapa tidak bisa melaksanakan pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan sebelumnya agar pihak bank mau melaksanakan rescheduling yang anda ajukan. Setelah itu tunjukkan dokumen yang diperlukan dan tunjukkan sikap yang kooperatif dengan cara mengikuti segala persyaratan dan prosedur yang berlaku.

3. Syarat rescheduling

Setelah mengajukan kepihak bank, bank akan mempelajari dan menentukan apakah layak atau tidak kredit bisa dikenakan rescheduling. Berdasarkan pasal 53 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 14/2012 syarat debitur dikatakan layak mendapatkan rescheduling, yaitu :

- a) Debitur melapor bahwa mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit.

- b) Berdasarkan PBI pasal 57 PBI 14/2012, debitur yang dapat diberikan rescheduling adalah debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban rescheduling yang diajukan.⁵²

B. Restructuring (penataan kembali)

1. Pengertian restructuring

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Di dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang telah diganti atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, pemerintah mengeluarkan restrukturisasi kredit yang bertujuan agar debitur yang terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini agar sedikit terbantu restrukturisasi ini meliputi :

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Perpanjangan jangka waktu.
- c. Pengurangan tunjangan bunga.
- d. Pengurangan tunjangan pokok.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Koversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Semua kebijakan tersebut diserahkan kepada bank dan sangat bergantung pada identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek

⁵² Wawancara dengan Agus Kurniawan, Bagian kepala bagian kredit, di PT. BPR BKK Kota Tegal, tanggal 11 Mei 2021 jam 13.05-14.30

usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak dari pandemi Covid-19. Jangka waktu restrukturisasi tersebut tergantung dari *assesmen* bank terhadap debitur dengan jangka waktu 3, 6, 9 dan paling lama 1 tahun.

2. Jenis-jenis restructuring

Dalam program restructuring ini memang ditunjukan kepada nasabah yang mengalami dampak langsung dari pandemi Covid-19 ini, oleh karena itu pemerintah memberikan jenis restructuring kepada nasabah tersebut, yaitu:

a) Potongan kredit dalam satu kali bayar

Program ini ditunjukan langsung kepada nasabah yang ingin langsung membayar semua hutang terhadap bank dengan satu kali bayar, nantinya terdapat potongan yang diberikan sehingga total hutangnya menjadi lebih kecil.

Akan tetapi kekurangan dari program tersebut adalah anda dituntut untuk memiliki uang yang banyak karena program ini berlaku untuk satu kali bayar saja.

b) Perpanjang tenor dengan bunga rendah

Restructuring dengan tujuan untuk memperpanjang tenor kredit yang dimiliki sehingga menjadi lebih ringan, bunga yang dibebankan juga lebih ringan dari bunga pada umumnya akan tetapi untuk program ini nasabah diminta untuk membayar DP setidaknya 10% dari hutang yang anda pinjam.

c) Diskon cicilan

Program diskon cicilan ini adalah penggabungan dari potongan kredit satu kali bayar dan perpanjang tenor dengan bunga rendah namun, program ini hanya

berlaku kepada beberapa bank saja jika nasabah memiliki kondisi yang mendukung untuk sulit melunasi hutang. Meskipun begitu, potongan yang diberikan tidak sebesar program satu kali bayar dan tenor cicilan tidak sepanjang program cicilan.

3. Proses pengajuan restructuring kredit

Sebelum nasabah melakukan restructuring, sebaiknya laporan keuangan perlu dilakukan pengecekan kembali. Tujuannya agar melihat kemampuan keuangan nasabah dan pihak bank akan melakukan penilaian kemampuan anda dalam pembayaran kredit. Setelah melakukan pengecekan nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak bank, selanjutnya bank selaku kreditur akan melakukan *assessment* dilihat dari profil resiko nasabah dan setelah disetujui restructuring kredit akan disampaikan melalui secara online atau dihubungi melalui nomor yang dicantumkan.

4. Syarat permohonan restructuring

Kredit macet yang dapat dimasukan ke dalam program restrukturisasi harus memenuhi persyaratan. Pasal 51 PBI7/2005 menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kepada debitur yang memenuhi criteria, Untuk dapat mengajukan restructuring pada suatu bank ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

- a) Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang pokok dan bunga kredit.

- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilai mampu untuk melunasi kewajiban setelah kredit direstructuring.⁵³

C. Reconditioning (penataan kembali)

1. Pengertian reconditioning

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dengan nasabah dan diharapkan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Maksudnya adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada konverensi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Dengan kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah.

2. kriteria reconditioning

Dalam pengajuan reconditioning nasabah harus benar benar mengalami dampak langsung dari pandemic covid-19 dan harus mengukur kemampuan dalam melunasi kredit, karena pihak bank akan menilai nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapat program tersebut. Berikut kriteria yang harus ada dalam pengajuan reconditioning, yaitu:

- a) Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit
- b) Debitur sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik serta diperkirakan mampu memenuhi kewajiabn setelah di reconditioning
- c) Debitur harus memiliki sikap kooperatif

⁵³ Iswi Hariani “*Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*” Jakarta:PT. Gramedia, 2010, hlm. 130

- d) Debitur juga harus memiliki itikad baik untuk melunasi hutang dan mau mengikuti prosedur yang ada.⁵⁴

D. Subsidi bunga

1. Pengertian subsidi bunga

Bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit atau pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.

Setelah restrukturisasi kredit, pemerintah kembali memberikan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bentuk subsidi bunga yang berasal APBN yang merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Yang digunakan untuk kredit atau pelaku usaha UMKM yang terdampak langsung dari pandemi covid-19 ini. Pemberian subsidi bunga ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan untuk berlakunya subsidi bunga dimulai sejak 1 Mei 2020 dan akan terus diperpanjang sampai dengan jangka waktu yang tidak diketahui, sedangkan subsidi bunga diberikan paling lama 6 bulan. Sedangkan besaran subsidi bunga yang diterima bermacam-macam tergantung besaran kredit yang didapat, untuk plafon kredit Rp. 10.000.000 rupiah diberikan subsidi paling besar 25% selama 6 bulan, dan untuk plafon kredit Rp. 500.000.000 rupiah diberikan subsidi paling besar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua, sedangkan untuk plafon diatas Rp. 500.000.000

⁵⁴ Wawancara dengan Agus Kurniawan, Bagian kepala bagian kredit, di PT. BPR BKK Kota Tegal, tanggal 11 Mei 2021 jam 13.05-14.30

hingga 10.000.000.000 diberikan subsidi bunga sebesar 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan selanjutnya.

2. Kriteria atau persyaratan penerima subsidi bunga

Sesuai dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan undang-undang PMK 65/PMK.05/2020 kriteria atau syarat agar dapat mendapatkan subsidi bunga nasabah harus memiliki :

- a. Memiliki plafon kredit paling tinggi Rp. 10.000.000.000 rupiah
- b. UMKM yang memiliki sisa pokok (baki debet) kredit sebelum masa pandemic covid-19 (terdapat baki dabet sampai 29 Februari 2020)
- c. Tidak termasuk daftar hitam nasional
- d. Memiliki kategori *performing loan* yang lancar dihitung pertanggal 29 Februari 2020
- e. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Untuk proses pengajuannya sendiri nasabah bisalangsung datang ke bank yang menyalurkan kredit, kemudian nasabah ajukan permohonan subsidi bunga sesuai dengan syarat dan kelengkapan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa dipahami bahwa setiap bank akan memiliki pedoman yang berbeda-beda dalam menetapkan debitur yang terserang Virus Corona (COVID-19), serta menetapkan standar serta wilayah yang akan ditetapkan terdampak penyebaran Virus Corona (COVID-19). Namun pada PT. BPR BKK Kota Tegal, tidak hanya sektor-sektor yang telah ditentukan saja yang dijadikan sebagai pedoman, melainkan seperti debitur yang sehari-harinya sebagai karyawan ataupun buruh yang mempunyai kredit di PT. BPR BKK Kota Tegal

secara langsung maupun tidak langsung terkena penyebaran Virus Corona dikarenakan area-area seperti perusahaan-perusahaan juga terdampak penyebaran Virus tersebut. Sehingga banyak para pekerjanya yang dirumah, otomatis mengalami pemotongan pendapatan dan tidak sedikit karyawan tersebut memiliki pinjaman kredit kepada pihak bank. Setelah persyaratan debitur selesai, bank akan melaporkan, sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang telah diganti atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Yang dapat diartikan bahwa bank memberikan laporan berdasarkan situasi secara offline pada setiap akhir bulan pada hari kerja. Laporan yang disampaikan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah laporan pendorong stimulus kredit, pembiayaan dan atau pendanaan lainnya yang diberikan sampai dengan akhir bulan. Laporan tersebut dievaluasi berdasarkan akurasi pembayaran. Dalam hal penyampaian secara offline laporan tersebut, protokol kesehatan tetap diperhatikan. Namun untuk PT. BPR BKK Kota Tegal dalam menyampaikan laporan tersebut secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana laporan tersebut berisi tentang jumlah debitur yang terdampak Virus Corona, baki debet dari debitur tersebut, kolektibilitas terakhir sebelum direstrukturisasi, dan sektor debitur tersebut yang berada di PT. BPR BKK Kota Tegal.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Agus Kurniawan, Bagian kepala bagian kredit, di PT. BPR BKK Kota Tegal, tanggal 11 Mei 2021 jam 13.05-14.30

2. Kendala yang dialami PT. BKK Kota Tegal dalam penanganan kredit macet selama Pandemi Covid-19

Dalam menyelesaikan kredit macet pasti ada saja kendala–kendala yang di hadapi, menurut Bapak Agus Kurniawan, SE sebagai kepala bagian kredit di PT. BPR BKK Kota Tegal pada tanggal 11 Juni 2021 menyatakan. Pandemi memengaruhi kemampuan pembayaran yang menyebabkan perubahan profil risiko debitur dan menyebabkan peningkatan NPL (non performing loan, kredit bermasalah). Banyak sekali kendala yang dialami nasabah ketika ingin membayar atau melunasi tagihan kredit mereka karena akibat dari pandemi ini, padahal sebagian besar dari mereka sudah melampaui jatuh tempo yang sudah di tetapkan oleh pihak bank.

Menurut data yang diberikan oleh Bapak Agus Kurniawan, SE (Kepala bidang penyelamatan kredit pada kantor PT. BPR BKK Kota Tegal) dikatakan bahwa kredit bermasalah itu dapat dibedakan menjadi 2 katagori yaitu:

1. Kredit bermasalah yang mempunyai prospek adalah apabila setelah di identifikasi dan di evaluasi permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa usaha debitur masih mempunyai harapan untuk di perbaiki kolektibilitas kreditnya.
2. Kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek yang lazimnya disebut kredit macet adalah apabila setelah di identifikasi dan di evaluasi permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa usaha debitur tidak mempunyai harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya dan sumber pelunasan kreditnya hanya dapat diharapkan lagi dari usaha lainya atau menjual agunan/ kekayaan perusahaan. Suatu kredit dikatakan kredit bermasalah yang tidak

memiliki prospek, apabila hasil evaluasi dan identifikasi oleh pihak bank, didapat bahwa :

- a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar seluruh utang – utangnya kepada kreditur.
- b. Usaha yang dijalankan oleh debitur tidak beroperasi lagi atau usaha itu mengalami kerugian besar.⁵⁶

Untuk menyelesaikan kredit yang tidak memiliki prospek sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi maka pihak PT. BPR BKK Kota Tegal akan melakukan langkah – langkah jalur kekeluargaan, dikarenakan banyak nasabah yang menjadi korban dari pandemi covid-19 di berbagai sektor dan bahkan hampir seluruh sektor, tidak hanya sektor kesehatan melainkan sektor perekonomian juga mengalami dampak serius akibat adanya pandemi virus corona yang mengakibatkan banyak dari masyarakat yang kehilangan usaha, pekerjaan, dan sebagainya ditambah pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* sehingga banyak aktifitas dari masyarakat yang tersendat.

Menurut Bapak Agus Kurniawan, SE (Kepala bidang penyelamatan kredit pada kantor PT. BPR BKK Kota Tegal) Ada 2 hal yang paling sering menjadi penghambat atau kendala dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu :

1. Faktor eksternal yaitu faktor yang dialami akibat nasabah itu sendiri atau diluar dari bank

⁵⁶ Tri Aditya Winata dkk, “*KENDALA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG DENPASAR.*” (Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Lokakarya Hukum Bisnis FH, Bali, 2014), hal. 6-8

- a. Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh pihak bank, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri dengan alasan mereka berpura-pura menjadi korban dari adanya pandemi virus corona ini. Hal ini yang menjadikan pihak bank harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bahwa nasabah itu terdampak atau tidak dari pandemi covid-19 ini.
- b. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan karena nasabah tersebut memang benar-benar mengalami dampak dari pandemi ini yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur.
- c. Debitur meninggal dunia, dimasa pandemi seperti ini pastinya banyak terjadinya orang meninggal secara mendadak dikarenakan tertular dari virus covid-19 ini sehingga orang yang masih memiliki kredit atau hutang di Bank tidak bisa atau terkendala dalam melunasi hutangnya.
- d. Debitur terpapar virus covid-19, ketika debitur terpapar covid-19 otomatis harus menjalani perawatan dan harus diisolasi sehingga mengalami hambatan ketika akan membayar hutangnya dikarenakan mereka tidak bekerja.

- e. Adanya kebijakan lockdown, pada masa-masa *lockdown* otomatis semua aktifitas yang ada akan terhambat bahkan berhenti total yang mengakibatkan perekonomian yang ada akan berhenti untuk sementara.⁵⁷
 - f. Prospek usaha nasabah debitur masih baik, namun nasabah debitur memperlihatkan sikap yang enggan untuk diajak bekerjasama oleh bank untuk mengupayakan program penyesuaian tersebut. Misalnya saja nasabah enggan tidak mengadakan penggantian personil yang duduk dalam manajemen perusahaan.
 - g. Kesulitan untuk mencari partner usaha yang bersedia dan mampu menambah modal (fresh money). Sekalipun prospek usaha dan kerjasama nasabah debitur baik.
 - h. Kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan aset perusahaan nasabah debitur yang tidak produktif dalam rangka memperbaiki struktur keuangan perusahaan.
 - i. Dalam hal kredit berbentuk kredit sindikasi. tidak diperoleh kesepakatan dan bank-bank peserta sindikasi mengenai syarat-syarat penyelamatan kredit.
 - j. Setelah program penyesuaian disetujui dan dituangkan dalam perjanjian ternyata kemudian tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan sebagai syarat-syarat penyelamatan kredit.⁵⁸
2. Faktor internal yaitu faktor yang dialami akibat pihak bank itu sendiri atau didalam dari bank

⁵⁷ Wawancara dengan Agus Kurniawan, Bagian kepala bagian kredit, di PT. BPR BKK Kota Tegal, tanggal 11 Mei 2021 jam 13.05-14.30

⁵⁸ Suhadibroto. dkk. disunting oleh Kartini Soedjendro. 2006, Kredit Macet Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya. edisi pertama, Yayasan Widya Patria. Yogyakarta, hlm 50-51

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti dalam melakukan survei atau peninjauan nasabah karena sebelum nasabah melakukan peminjaman atau mengajukan pinjaman harus disurvei pihak analisis bahwa nasabah itu layak atau tidak mendapatkan kredit atau pinjaman itu. Jika pihak analisis kurang teliti maka apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.⁵⁹ Sebelum pihak bank memberikan kredit sebaiknya bank melakukan pemeriksaan analisis dan evaluasi kredit Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 29 Ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya dan sudah disepakati bersama. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis kredit sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Apabila kegiatan analisis kredit dilakukan secara baik dan benar, maka dikemudian hari akan terhindar dari risiko kredit macet atau kredit bermasalah. Selain penerapan proses analisis yang baik, upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang tepat sangat diperlukan guna menghindari terjadinya kerugian pihak bank.

Analisis kredit meliputi:

a) Pemeriksaan di lapangan

kepada calon nasabah Pemeriksaan di lapangan kepada calon nasabah meliputi aspek pemeriksaan kredit dengan mengacu pada prinsip 5C

⁵⁹ Wawancara dengan Agus Kurniawan, Bagian kepala bagian kredit, di PT. BPR BKK Kota Tegal, tanggal 11 Mei 2021 jam 13.05-14.30

(character, capital, capacity, condition of economic, dan collateral), terhadap usaha debitur untuk mengetahui, menilai dan meyakini keterangan yang telah tertuang dalam surat permohonan kredit, dan membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan meliputi nama nasabah (perorangan/badan usaha), pekerjaan, alamat, hasil pendapatan rutin, pendapatan bersih, ketentuan maksimum kredit dan jangka waktu kredit, agunan dan taksiran harga, jumlah kredit yang diajukan pemohon, jumlah kredit yang direkomendasikan, memeriksa kebenaran dan keaslian dokumen yang akan dijadikan jaminan serta dokumen lainnya.

b) Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi pemberian kredit berdasarkan hasil laporan analisis kredit yang telah dilakukan dengan ketentuan: rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas permohonan kredit yang dituangkan dalam laporan analisis kredit dan didasarkan pada analisis serta evaluasi yang obyektif, pembuatan rekomendasi tidak melanggar kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan, proses putusan pemberian kredit dilakukan oleh Kepala Unit dimana sebelum pemberian putusan wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung adalah lengkap dan sah, dalam hal ini menghasilkan keputusan kredit yang menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima maka akan disiapkan administrasinya.

Biasanya keputusan kredit mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit

c. Biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu juga bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan dengan alasannya masing-masing.⁶⁰

⁶⁰Rafika Lihani, "*Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)*", Jurnal Penelitian, Volume 1, Nomor 3, Juli, 2013, hlm. 6.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam perkembangan penyebaran Covid-19 secara global di seluruh dunia yang telah berdampak secara langsung atau pun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan pinjaman di suatu bank sehingga dapat berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur. untuk meningkatkan kualitas kredit di masa pandemi covid-19 ini, bank memberikan berbagai jalan keluar kepada debitur dengan melakukan perubahan syarat-syarat addendum kredit sesuai dengan POJK yang berlaku dimana bank dan debitur telah sepakat untuk menyetujui mengadakan perubahan dan atau tambahan dalam perjanjian kredit.

Dan penyebab dari adanya kredit macet dapat berasal dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu yang berasal dari penyimpangan dari pelaksanaan kredit, atau kurangnya informasi tentang kredit macet dan juga faktor eksternal contoh penyebabnya adalah kegagalan usaha dari debitur, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi apa lagi di masa pandemi covid-19 ini. Dalam keadaan pandemi saat ini PT. BPR BKK Kota Tegal mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu : Rescheduling (penjadwalan kembali), Restructuring (penataan kembali), Reconditioning (penataan kembali), Subsidi bunga. Akan tetapi pada bank BPR sendiri paling sering menentaskan kredit macet yaitu dengan cara rescheduling. Kreditur akan

menawarkan penjadwalan ulang terhadap debitur, dengan kata lain tenor kredit yang berlaku sebelumnya bisa diperpanjang menurut kebijakan kreditur. Dan jika ada debitur yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran kredit, dapat melapor bahwa mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Semua kebijakan tersebut diserahkan kepada bank dan sangat bergantung pada identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak dari pandemi covid-19. Dengan adanya Restructuring ini bertujuan untuk memperpanjang tenor kredit yang dimiliki sehingga menjadi lebih ringan, bunga yang dibebankan juga lebih ringan dari bunga pada umumnya.

Tujuannya agar melihat kemampuan keuangan nasabah serta pihak bank akan melakukan penilaian kemampuan anda dalam pembayaran kredit. Untuk dapat mengajukan restrukturisasi pada suatu bank ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

- a. Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang pokok dan bunga kredit.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilai mampu untuk melunasi kewajiban setelah kredit direstructuring.

2. kendala yang dialami selama pandemi covid-19 oleh bank PT. BPR BKK Kota Tegal dalam menangani kredit macet ini sebenarnya permasalahan yang sangat serius karena selama pandemi ini banyak nasabah yang benar benar mengalami kesulitan dalam ekonomi karena berbagai faktor yaitu : kehilangan pekerjaan akibat dari pemangkasan karyawan, diberlakukannya ppkm dan

lockdown sehingga mobilitas perdagang terganggu, nasabah terpapar virus covid-19 sehingga mereka harus dikarantina.

B. Saran

1. agar meminimalisir terjadinya kredit macet, sebelum pemberian kredit perlu adanya evaluasi yang cukup serius dan jauh jauh hari sebelum jatuh tempo agar nasabah diingatkan dan selalu diawasi agar meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. pada masa pandemi covid-19 ini apa bila terjadi kredit macet pada nasabah maka nasabah perlu bernegosiasi atau membicarakan hal ini pada bank dengan jujur untuk pihak bank harus membantu nasabah dan mempermudah proses penanganan kredit macet agar menyelesaikan permasalahan kredit dengan *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Asyhadie Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan*, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1.

Fauziah Fenty. 2017. *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Samarinda: RV Pustaka Horizon.

Hariani Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Gramedia.

Hariyani Iswi. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

J Satrio. 1993. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni.

Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mamudji Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Naja, H.R. Daeng. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Raharjo Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rivai Veithzal. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Salim, H.S., dkk. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sari Elsi Kartika, Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Widiarsana Indonesia.

Sembiring Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto Soerjono. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Subekti, Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suhadibroto, dkk. disunting oleh Kartini Soedjendro. 2006. *Kredit Macet Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Yayasan Widya Patria. Edisi Pertama.

Untung H Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor tentang POJK Nomor 48/POJK.03/2020

Undang-Undang Nomor tentang PBI pasal 57 PBI 14/2012

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Jurnal dan Skripsi :

Fauzi Ahmad. 2010. *Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 3: Inovatif.

Lihani Rafika. 2013. *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar*. Jurnal Penelitian Volume 1 Nomor 3.

Ningsih Mardhiyatur Rositi. 2020. *Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah*. Skripsi sarjana hukum. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.

Sinambela Bungaran Kevin. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Yang Objek Jaminannya Hak Atas Tanah Berstatus Hak Milik(Studi Kasus Di PT BPR Asia Bintang Cemerlang Medan)*. Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Perpustakaan Fakultas Hukum USU.

Winata Tri Aditya, dkk. 2014. *Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar*. Bali: Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Lokakarya Hukum Bisnis FH.

Wawancara :

Wawancara dengan Agus Kurniawan. Bagian kepala bagian kredit. di PT. BPR BKK Kota Tegal.

Website :

home - PT. BPR BKK Kota Tegal (ptbprbkkkotategal.com, diakses pada 13 Mei 2021 pukul 19.59 WIB)

<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> dikutip pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.45

<https://www.kompasiana.com/muhrizalalamin/5ebbb15ed541df498400f703/pengaruh-covid-19-terhadap-tingkat-kesehatan-bank-di-indonesia> dikutip pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.45

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Doni Yahya Novianto
 NPM : 5117500166
 Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 November 1999
 Alamat : Jl. Sumbodro no.9 Gg.5 Slerok, Kota Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Kejambon 6	2005	2011
2	SMP Negeri 14 Tegal	2011	2014
3	SMA AL-IRSYAD Tegal	2014	2017
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya.

Tegal, 30 Juli 2021

Hormat saya,

(Mohamad Doni Yahya Novianto)